

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018- 2023



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

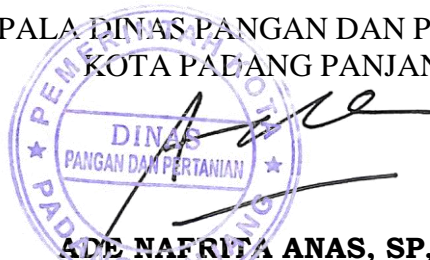
Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 telah dapat diselesaikan. Perubahan Renstra ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2018 - 2023 yang penyusunannya didasarkan juga pada kondisi dan aspirasi dari *stake holder* yang kesemuanya merupakan komponen yang saling melengkapi dalam perencanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian di Kota Padang Panjang. Selanjutnya Perubahan Renstra yang telah tersusun ini akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang selama 5 tahun.

Ucapan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 ini dengan harapan semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang Panjang, Desember 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PANJANG' around the perimeter and 'DINAS PANGAN DAN PERTANIAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ADE NAFRITA ANAS, SP, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Provinsi	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	53
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	58

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII	PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka dokumen rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengacu kepada RPJMD Provinsi (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat).

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, maka Dinas Pangan dan Pertanian wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras sebagai jenis makanan pokok utama. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Sedangkan definisi pangan dalam Undang-Undang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Karena itu, Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan pangan seluruh rakyat sampai tingkat perseorangan dengan harga yang wajar (food security), namun juga memperjelas cara pencapaiannya, yaitu

dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (food resiliency); dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (food sovereignty).

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bahkan kemandirian pangan adalah dengan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis sektor lain.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan amat berpengaruh terhadap keberadaan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan karakter daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, organisasi perangkat daerah yang diberi tugas untuk urusan pangan dan pertanian yaitu Dinas Pangan dan Pertanian. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merupakan penggabungan dari Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Padang Panjang. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka semua yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya diperlukan pula perubahan atau penyesuaian, diantaranya adalah Rencana Strategis Dinas yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan akan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Pertanian.

Memahami hal tersebut di atas maka dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang sudah disusun berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terakhir yang ada di Kota Padang Panjang.

Dimana hal itu tetap merupakan suatu upaya yang terprogram dan sistematis serta dapat diukur tingkat ketercapaiannya.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan ditetapkannya perubahan RPJMD Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukanlah perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang perlu untuk melakukan penyesuaian berupa penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 guna mengakomodir berbagai perubahan kebijakan yang belum termuat dalam Renstra sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan naskah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
2. Tersedianya dokumen yang mampu menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;

3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian untuk 5 (lima) tahun mendatang; dan
4. Sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pangan dan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan bidang lain.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, yang merupakan jabaran dari visi dan misi Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Renstra Daerah Kota Padang Panjang;
2. Sebagai pedoman bagi pejabat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
3. Menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal dalam bentuk strategi, kebijakan dan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. menyusun dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian untuk pengembangan pembangunan pertanian;
- f. melakukan penataan prasarana dan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengawasan peredaran sarana pertanian berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian dan menanggulangi hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. melakukan pengendalian dan menanggulangi bencana alam skala daerah;
- k. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil panen di bidang pertanian;
- l. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha dan rekomendasi teknis di bidang pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- o. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian;
- p. melaporkan kegiatan dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan pelaksana penyuluhan serta ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Tani; dan
- c. Seksi Perikanan.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskesmas pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

8. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

9. UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

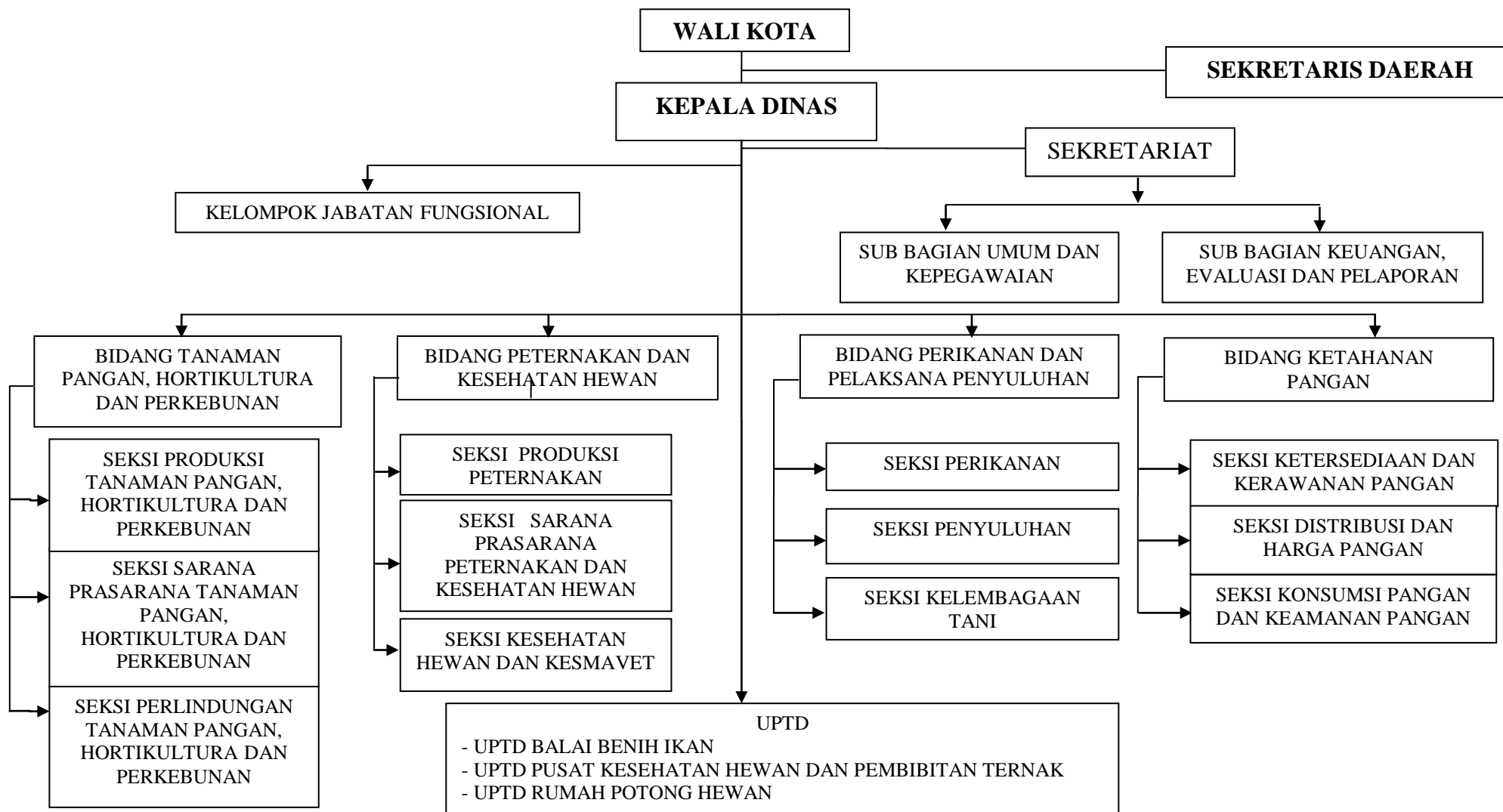
Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis, sarana dan prasarana Dinas Pangan dan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Gol Ruang PNS				Pendidikan								Jenis Kelamin		Jml		
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D III	D IV	S1	S2	P	L	PNS	PPPK	THL	
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	7	26	7	1	-	18	2	1	45	4	33	39	10	4	27	
2	UPTD BBI	-	-	3	-	-	-	9	1	-	1	-	2	9	7	-	9	
3	UPTD Puskesmas	1	3	1	1	1	1	2	-	-	5	-	4	5	6	-	5	
4	UPTD RPH	-	1	2	-	0	1	7	1	1	3	-	2	10	14	-	6	
	Jumlah	1	11	32	8	2	2	36	4	2	54	4	41	63	52	4	47	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan data Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diatas jumlah PNS sebanyak 52 orang, PPPK sebanyak 4 orang dan THL sebanyak 47 orang, dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada kepala seksi pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh kepala seksi yang bersangkutan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Transportasi

Jumlah kendaraan dinas untuk operasional, baik yang berada di Dinas Pangan dan Pertanian maupun pada UPTD Puskesmas, BBI dan RPH adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Roda 4	Roda 3	Roda 2	Roda 6
1	Kantor Dinas Pangan dan Pertanian	5	1	38	-
2	UPTD BBI	-	1	3	-
3	UPTD RPH	1	-	4	1
4	UPTD Puskesmas	1	1	5	-
	Jumlah	7	3	51	1

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021

Dari segi jumlah kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak yang disebabkan tahun produksi yang terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

b. Prasarana Gedung Kantor

1. Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terletak di jalan Ahmad Yani No 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
2. Kantor UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dibangun pada tahun 2011 dan terletak di kawasan RPH Kelurahan Silaing Bawah. Kantor ini dilengkapi dengan fasilitas peralatan laboratorium kesehatan hewan, fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan bibit sapi perah unggul melalui program Rearing Unit.
3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dengan luas 2 ha terletak di Kelurahan Silaing Bawah dan baru direnovasi pada tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. UPTD RPH ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana pemotongan sesuai dengan standar dan sudah dilengkapi dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pemotongan sesuai syariat islam.
4. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dengan luas 2 ha terletak di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk. Balai Benih Ikan ini sudah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk komoditas Ikan Nila serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium kualitas air, ruang pertemuan dan mess/tempat penginapan. Mess atau tempat penginapan memiliki 11 kamar dengan kapasitas huni sebanyak 44 orang yang digunakan untuk mendukung fungsi BBI sebagai pusat pelatihan perikanan dan juga dapat digunakan untuk kepentingan umum.
5. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Barat yang berlokasi di kawasan RPH Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Bawah.
6. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Timur yang berlokasi di ex. Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Ganting.

2.2.3. Lahan Pertanian

Untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian juga sangat dipengaruhi oleh lahan yang tersedia sebagai sarana

peningkatan produksi pertanian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Luas Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Sawah	552
2	Perkebunan	264
3	Perikanan	87

Sumber Data: Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data di atas luas lahan sawah seluas 552 ha, perkebunan seluas 264 ha dan perikanan seluas 87 ha.

2.2.4. Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Organisasi Petani

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	140
2	Gabungan Kelompok Tani	17
3	Kelompok Perikanan	44

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 140 kelompok dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 17 kelompok serta kelompok perikanan sebanyak 44 kelompok.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					-4	-5	1	2	-4	-5	1	2	-4	-5	1	2
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				85	85	85	85,25	84,1	85	80,20	85,60	98,94%	100%	94,35%	100,41%
2	Persentase Produksi Benih Perikanan (%)				100%	52,50%	-	-	73,92%	52,54%	-	-	73,92%	100,08%		
3	Persentase Produksi Ikan Konsumsi				100%	81,30%	-	-	96,08%	81,33%	-	-	96,08%	100,04%		
4	Persentase Produktivitas sektor pertanian (%)				NA	1%	-	-	NA	28,78%	-	-	NA	28,78%		
5	Peningkatan Produksi Rata-Rata Susu Per Tahun				NA	481.469 liter/tahun	-	-	NA	442.170 liter/tahun	-	-	NA	91,84%		
6	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian				5,58	5,67%	-	-	5,41	5,41%	-	-	96,95%	95,41%		
7	Produksi susu sapi				-	-	396.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun	-	-	396.720 liter/tahun	326.206 liter/tahun			100,18%	78,79%
8	Pendapatan pembudidaya ikan				-	-	17.222.000 rupiah/tahun/RTP	18.083.100 /rupiah/tahun/RTP	-	-	20.187.640 rupiah/tahun/RT P	18.580.002 rupiah/tahun/RTP			117,22%	102,75%
9	Produksi padi				-	-	6.634 ton	6.750 ton	-	-	9.810,6 ton	8.557 ton			147,88%	126,77%
10	Persentase terbentuknya klaster tanaman hias				-	-	5%	25%	-	-	5%	5%			100,00%	20,00%
11	Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos				-	-	2%	8%	-	-	0	10%			0,00%	125,00%
12	Meningkatnya pendapatan petani				-	-	10%	20%	-	-	10%	24%			100,00%	120,00%

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam untuk tahun 2017-2018 dan 7 macam untuk tahun 2019-2020, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran persentase produksi benih perikanan adalah Jumlah produksi benih ikan (ekor) bagi target daerah (ekor) kali seratus persen.
3. Cara pengukuran persentase produksi ikan konsumsi adalah jumlah ikan konsumsi (ton) bagi target daerah (ton) kali seratus persen.
4. Cara pengukuran persentase produktivitas sektor pertanian adalah selisih produktivitas tahun lalu dengan tahun berjalan dibagi dengan produktivitas tahun lalu kali seratus persen.
5. Cara pengukuran peningkatan produksi rata-rata susu per tahun adalah jumlah produksi susu keseluruhan dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran persentase kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian adalah Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan dibagi Jumlah PDRB kali seratus persen.
7. Cara pengukuran produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/tahun
8. Cara pengukuran pendapatan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi ikan dikali harga ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan)
9. Cara pengukuran produksi padi adalah jumlah produksi padi per tahun

10. Cara pengukuran persentase terbentuknya kluster tanaman hias adalah progress tahapan pembentukan kluster tanaman hias, yaitu:
 - Tahap 1 (5%) = perencanaan
 - Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana
 - Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan SDM petugas dan petani
 - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya kluster tanaman hias
11. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani penerima bansos adalah pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
12. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani adalah persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase Produktivitas Sektor Pertanian

Capaian Persentase Produktivitas Sektor Pertanian pada Tahun 2018 sebesar -28,78% dengan persentase capaian sebesar -2.878%. Produktivitas padi tahun 2018 sebesar 4,5 ton/ha angka sementara data dari Badan Pusat Statistik, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 6,4 ton/ ha. Target indikator kinerja persentase produktivitas sektor pertanian tahun 2018 ditargetkan naik 1% dari produktivitas padi tahun lalu.

2. Peningkatan Produksi Rata-Rata Susu Per Tahun

Capaian peningkatan produksi rata-rata susu per tahun pada tahun 2018 sebesar 442.170 liter/tahun dengan persentase capaian sebesar 91,84%. Indikator peningkatan produksi rata-rata susu per tahun pada tahun 2018 ditergetkan 481.469 liter/tahun.

Indikator Kinerja Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian/ perkebunan tidak mencapai target tahun ke lima rencana strategis, dengan masalah sebagai berikut:

Hambatan/ masalah:

1. Menurunnya Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman pangan (padi) karena : adanya perbaikan jaringan irigasi Kubang Laweh yang sempit membuat jadwal tanam tertunda selama delapan bulan (Januari-Agustus) di Kelurahan Ekor Lubuk Kelompok Tani Simbaru.
2. Adanya serangan hama tikus seluas 79,5 ha, hama kresek 1,9 ha dan Blast 6 ha sepanjang tahun.
3. Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi perkantoran, perumahan, tempat ibadah dan sebagainya.
4. Berkurangnya populasi sapi perah dikarenakan beberapa peternak melakukan penjualan sapi karena kesulitan pemasaran.
5. Daya serap pasar yang terbatas terhadap produk susu sehingga menimbulkan kurangnya animo peternak sapi perah untuk menambah atau meningkatkan populasi ternaknya.
6. Masih tinggi biaya operasional produksi sapi perah dimana salah satu penyebabnya adalah tingginya harga pakan.

Strategi pemecahan masalah:

1. Perbaiki jaringan irigasi Kubang Laweh.
2. Adanya himbuan kegiatan Gerakan Berburu Tikus di Kota Padang Panjang, serta adanya bantuan sarana penangkapan hama tikus seperti racun tikus dan sebagainya. Kemudian perlu dilakukan upaya budidaya tanaman sehat sehingga bisa terhindar dari serangan hama dan penyakit melalui penerapan teknologi budidaya penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan pengendalian hama dan penyakit.
3. Penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Padang Panjang.
4. Meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran susu sapi serta melakukan diversifikasi olahan susu.
5. Melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan semen beku sexing untuk meningkatkan kelahiran anak sapi perah betina.

6. Perlunya sentral pakan penyediaan bahan baku pakan untuk ternak sapi perah sehingga bisa menekan biaya operasional.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.748.690.750	2.645.278.400	2.658.039.400	2.009.279.650	2.435.253.720	2.161.163.127	2.233.669.761	1.829.552.653	88,60	81,70	84,03	91,06	8.554.328.463	7.287.474.771
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000,00	3.927.000,00	4.500.000		3.570.000	3.927.000	4.425.000		100,00	100,00	98,33		11.997.000	11.922.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.880.000	121.020.000	183.420.000		108.993.841	93.933.457	136.376.944		65,71	77,62	74,35		470.320.000	339.304.242
Kegiatan Penyediaan Jasa Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	493.469.585	567.354.900	545.126.900	390.157.700	382.568.499	369.473.357	368.660.821	305.571.915	77,53	65,12	67,63	78,32	1.703.490.810	1.197.095.656
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.700.000				87.975.000				81,69				107.700.000	87.975.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	950.478.965	764.614.000	620.524.000	230.546.000	872.164.905	610.298.935	576.063.877	228.785.518	91,76	79,82	92,84	99,24	2.393.253.465	2.115.724.097
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.010.000	29.000.000	43.500.000		43.520.000	28.986.500	43.265.400		98,89	99,95	99,46		116.510.000	115.771.900
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.267.500	52.340.000	46.579.500	48.770.000	28.485.550	37.797.600	32.777.500	45.721.350	76,44	72,22	70,37	93,75	148.379.500	110.490.988
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.675.000	16.000.000	15.500.000	154.650.000	11.894.300	15.744.850	15.467.500	129.415.557	93,84	98,41	99,79	83,68	82.837.500	75.460.539
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	96.780.000	47.250.000	67.200.000	19.250.000	73.789.000	44.813.700	47.890.500	18.125.210	76,24	94,84	71,27	94,16	216.042.500	171.024.503
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	347.000.000	498.771.500	485.725.000	140.029.750	345.672.553	497.988.543	434.043.988	131.668.690	99,62	99,84	89,36	94,03	1.366.503.938	1.310.622.257
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	489.859.700	545.001.000	645.964.000	1.025.876.200	476.620.072	458.199.185	574.698.231	970.264.413	97,30	84,07	88,97	94,58	1.937.293.750	1.752.083.591
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	162.563.548	252.684.000	152.934.000	93.140.000	113.828.500	266.592.210	116.919.000	87.964.000	69,01	88,84	76,45	94,44	591.466.548	519.330.710
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.700.000	103.650.000			22.680.000	98.410.300			91,82	94,94			128.350.000	121.090.300
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	40.000.000	65.000.000	95.000.000	31.140.000	39.260.000	64.642.650	85.059.050	26.030.000	98,15	99,45	89,54	83,59	207.785.000	195.469.200
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	61.670.000	74.034.000	52.934.000		48.608.500	49.843.500	30.493.750		78,82	67,33	57,61		188.638.000	128.945.750
Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	36.193.548	10.000.000	5.000.000		1.640.000	6.695.760	1.366.200		4,53	66,96	27,32		51.193.548	9.701.960

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	47.400.000		62.000.000	1.640.000	47.000.000		61.934.000		99,16		99,89	62.900.000	64.123.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	30.000.000	50.000.000		18.000.000	9.100.000	42.868.000		60,00	30,33	85,74		110.000.000	69.968.000
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30.000.000	30.000.000	50.000.000		18.000.000	9.100.000	42.868.000		60,00	30,33	85,74		110.000.000	69.968.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	591.000	649.800	799.800		405.000	649.800	719.000		68,53	100,00	89,90		2.040.600	1.773.800
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.000	129.700	499.900		87.500	129.700	467.000		74,15	100,00	93,42		747.600	684.200
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	140.000	154.000			100.000	154.000			71,43	100,00			294.000	254.000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100.000	133.100			100.000	133.100			100,00	100,00			233.100	233.100
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	233.000	233.000	299.900		117.500	233.000	252.000		50,43	100,00	84,03		765.900	602.500
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	72.721.850	333.812.500	867.012.800	101.905.000	207.847.450	299.907.645	791.066.029	101.199.375	93,66		91,24	99,31	1.299.023.400	1.324.120.968
Kegiatan Penyusunan Sumber Pangan Alternatif			203.800.000				190.855.350				93,65		203.800.000	190.855.350
Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	21.237.500	84.897.500	199.735.000	58.630.000	20.178.000	82.060.000	180.736.246	58.000.500	95,01		90,49	98,93	320.527.500	297.474.371
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	121.850	108.600.000	45.575.000		113.204.700	89.220.795	40.742.500		92,90	82,16	89,40		154.296.850	243.167.995
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	23.972.500	114.415.000			23.021.000	109.919.800			96,03	96,07			138.387.500	132.940.800
Kegiatan Analisis Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	27.390.000	18.450.000	7.025.000		25.721.875	12.758.000	6.197.500		93,91	69,15	88,22		52.865.000	44.677.375
Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok		7.450.000	10.612.500	2.350.000	25.721.875	5.949.050	9.505.250	2.287.000		79,85	89,57	97,32	18.650.000	41.747.925
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah			33.235.000	40.925.000			29.040.300	40.911.875			87,38	99,97		
Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan			58.235.000				47.574.500				81,69			
Penanganan Daerah Rawan Pangan			27.374.800				25.505.000				93,17			
Analisis Ketersediaan Pangan			12.700.000				11.649.500				91,73			

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian			109.870.500				109.870.500				100,00			
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija			20.000.000				7.434.250				37,17			
Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan			138.850.000				131.955.133				95,03			
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	236.100.000	1.216.748.000	580.839.000	599.973.000	428.173.517	532.475.000	506.577.487	596.299.250	98,12		87,21	99,39	2.183.680.250	1.616.300.817
Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	36.900.000	72.700.000	65.930.000		35.169.517	283.850.000	60.380.550		95,31		91,58		175.530.000	379.400.067
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	199.200.000	353.980.000	114.500.000	99.685.000	196.502.000	62.038.000	109.210.000	98.799.500	98,65	17,53	95,38	99,11	692.601.250	392.449.875
Kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)		790.068.000	400.409.000	500.288.000	196.502.000	186.587.000	336.986.937	497.499.750		23,62	84,16	99,44	1.315.549.000	844.450.875
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	360.040.125	210.999.000	74.599.800		304.244.305	137.246.650	65.877.450		84,50		88,31		645.638.925	507.368.405
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	252.827.625	144.323.000	74.599.800		215.468.505	98.010.150,00	65.877.450		85,22	67,91	88,31		471.750.425	379.356.105
Kegiatan Optimalisasi Kemampuan Komisi Penyuluh	82.012.500				65.172.700,00				79,47				82.012.500	65.172.700
Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	25.200.000	66.676.000			23.603.100,00	39.236.500,00			93,66	58,85			91.876.000	62.839.600
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	700.155.000	586.064.000			508.265.000	728.585.350			72,59				1.286.219.000	1.236.850.350
Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	345.030.000	26.705.000			213.276.650	20.390.750			61,81	76,36			371.735.000	233.667.400
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	135.600.000				131.765.850				97,17				135.600.000	131.765.850
Kegiatan DAK Pertanian	144.000.000	559.359.000			144.000.000	550.959.100			100,00	98,50			703.359.000	694.959.100
Kegiatan Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	75.525.000	-			19.222.500	-			25,45				75.525.000	19.222.500
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan		168.598.000			-	157.235.500				93,26			168.598.000	157.235.500

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	736.000.000	164.360.000	1.775.288.000	-	607.822.700	156.340.250	1.677.193.370	-	82,58	95,12	94,47		2.675.648.000	2.441.356.320
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	288.450.000	65.175.000	61.560.000		192.876.950	61.557.250	56.341.370		66,87	94,45	91,52		415.185.000	310.775.570
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	393.435.000	99.185.000			367.091.250	94.783.000			93,30	95,56			492.620.000	461.874.250
Kegiatan Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam	54.115.000				47.854.500				88,43				54.115.000	47.854.500
DAK Bidang Pertanian			1.713.728.000				1.620.852.000				94,58			
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				234.074.900	-			232.540.036				99,34	58.518.725	58.135.009
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan				93.674.900				93.183.886				99,48	23.418.725	23.295.972
Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Pertanian				9.100.000				8.660.800				95,17	2.275.000	2.165.200
Kegiatan Pengembangan Teknologi Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah				3.300.000				2.754.800				83,48	825.000	688.700
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan				125.000.000				124.940.550				99,95	31.250.000	31.235.138
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna				3.000.000				3.000.000				100,00	750.000	750.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	90.277.450	31.475.000			82.573.950	28.822.900			91,47	91,57			121.752.450	111.396.850
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	69.500.000	31.475.000			66.763.500	28.822.900			96,06	91,57			100.975.000	95.586.400
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	20.777.450				15.810.450				76,09				20.777.450	15.810.450
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian				7.598.850				7.598.850				100,00		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat				7.598.850				7.598.850				100,00	1.899.713	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	322.425.000	272.804.000	300.065.000	231.670.000	298.422.700	235.790.850	258.912.100	226.660.100	92,56	86,43	86,29	97,84	953.211.500	849.790.675
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	322.425.000	272.804.000	300.065.000	231.670.000	298.422.700	235.790.850	258.912.100	226.660.100	92,56	86,43	86,29	97,84	953.211.500	849.790.675
Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	1.738.115.000	2.162.286.000	1.886.274.800	432.491.100	932.991.575	1.978.407.407	1.498.754.703	397.758.250	53,68	91,50	79,46	91,97	5.894.798.575	4.509.593.248
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak	723.760.000	1.071.715.000	813.009.000	353.425.000	670.679.375	991.118.157	671.659.453	352.569.150	92,67	92,48	82,61	99,76	2.696.840.250	2.421.599.273
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	-	290.644.000	457.395.300		-	280.938.500	317.811.500			96,66	69,48		748.039.300	598.750.000
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.014.355.000	48.900.000	69.780.500	2.000.000	262.312.200	27.846.750	64.306.750	1.926.750	25,86	56,95	92,16	96,34	1.133.535.500	354.947.388
Kegiatan Sarana dan Prasarana Peternakan		751.027.000	546.090.000	77.066.100	262.312.200	678.504.000	444.977.000	43.262.350		90,34	81,48	56,14	1.316.383.525	1.396.608.788

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian :

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain;
4. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian;
5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/ hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

2.4.2 Peluang

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 3.119,60 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 176 hari dalam setahun, sehingga komoditi pertanian dan perikanan dapat berkembang dengan baik;
3. Kondisi jalan dan akses transportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang (5,15 %). (sumber PPDA tahun 2021);
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;

6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah dan tanaman hias.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pangan dan Pertanian, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal	1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kemampuan ekonomi 2. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi) 3. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum 4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
2.	Menurunnya jumlah populasi ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produksi susu sapi 2. Menurunnya minat masyarakat untuk beternak karena tingginya biaya produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemasaran dan pengolahan hasil produksi susu sapi 2. Masih tingginya angka kematian ternak

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Belum optimalnya penerapan teknologi pasca panen peternakan 4. Belum semua produk olahan susu memiliki izin edar 5. Masih adanya indukan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.	Rendahnya Pendapatan Petani Ikan pada Usaha Budidaya Ikan	1. Rendahnya produksi perikanan	1. Tingginya Biaya Produksi pada Budidaya Ikan 2. Rendahnya kualitas SDM Petani Ikan dalam Budidaya Ikan 3. Belum Adanya Penghasil Pakan Ikan dengan Harga yang Terjangkau
4.	Rendahnya Produksi Pertanian	1. Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian 2. Rendahnya Produktivitas Pertanian	1. Kebutuhan Lahan untuk Pemukiman dan sarana lainnya 2. Berkembangnya Hama Penyakit Tanaman 3. Petani Kebanyakan Penggarap 4. Kurangnya SDM Petani yang Mengelola Kelembagaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Belum diterapkannya budidaya tanaman sehat 6. Belum Optimalnya Penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani.
5.	Rendahnya pendapatan petani peternak	1. Masih tingginya angka kemiskinan peternak	1. Belum optimalnya SDM peternak 2. Tingginya biaya produksi 3. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2021

5.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Padang Panjang adalah “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT” yang di dukung oleh 3 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif.

Dinas Pangan dan Pertanian mendukung Misi ke satu yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tujuan 1) meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan; 2) menurunnya angka kemiskinan; 3) meningkatnya pendapatan masyarakat dan 4) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran 1) meningkatnya produksi pertanian dan perikanan; 2)

meningkatnya pendapatan petani penerima bantuan sosial; 3) meningkatnya pendapatan petani dan 4) menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan. Dengan strategi 1) Peningkatan Produksi Peternakan dan Produk Olahannya; 2) peningkatan pendapatan pembudidaya ikan; 3) peningkatan produksi padi; 4) peningkatan persentase terbentuknya klaster tanaman hias; 5) fasilitasi peningkatan pendapatan petani penerima bansos; 6) pemakaian teknologi di bidang pertanian dan 7) Pelaksanaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi sektor pangan.

Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian yang mendukung secara langsung Program Walikota Padang Panjang “Gerakan Warga Berdaya Kota Berjaya (Pemanfaatan pekarangan dan lingkungan menanam bunga, sayur, buah, pohon, beternak, berkolam, industri rumah tangga)” adalah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

3.3 Telaahan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketahanan pangan dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat;
3. Meningkatnya keamanan pangan;
4. Meningkatnya stabilisasi harga pangan pokok dan strategis;
5. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Dinas Pangan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;
2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;
4. Pemberdayaan daerah rentan pangan;
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
6. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pangan menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;
2. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat;
4. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
5. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
6. Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
8. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
9. Pengawasan peredaran sarana pertanian
10. Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan
11. Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun (2021-2026) mendatang ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3 : Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.1. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;	- Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
		1.2. Pemberdayaan daerah rentan pangan	- Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
	1.2 Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.1. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;	- Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan; - Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal

	1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan	3.1 Peningkatan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen; - Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar di tingkat produsen dan konsumen - Pengawasan peredaran sarana pertanian - Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan - Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
	1.4 Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan strategis (Akses Pangan)	4.1 Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau. - Subsidi harga terhadap pangan pokok strategis

Sumber : Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pendapatan petani yang diturunkan ke dalam sasaran meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga menetapkan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang

melayani dimana tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatnya tata kelola organisasi.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada
 - b. pelaku utama dalam berusaha tani
 - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - d. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - e. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - f. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta
 - g. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - h. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - i. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
 - j. Pengawasan pupuk bersubsidi
 - k. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan
 - l. dan hortikultura
 - m. j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku
 - n. utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - o. k. Rehabilitasi Lahan dan Air
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian;
 - b. Mendorong tumbuh petani milenial;
 - c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian.
3. Pengembangan sistem Value Chain, dengan kebijakan :
 - a. Meningkatkan akses permodalan
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c. Peningkatan pengawasan agroinput
 - d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - e. Pengembangan jaringan produk pertanian
 - f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
 - g. Pengintergrasian program pertanian

Secara umum, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi Lahan dan Air
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 2. Mendorong tumbuhnya petani milenial 3. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian
Misi 7:			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola organisasi	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah yang baik	1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD 2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan 3. Penatausahaan Keuangan OPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Sumber: Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026

Adapun Indikaor Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I	Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi perkebunan :								
			- Kakao	%	1	1	1	1	1	1	
			- Karet	%	1	1	1	1	1	1	
			- Kopi	%	1	1	1	1	1	1	
			- Kelapa Sawi	%	1	1	1	1	1	1	
			- Kelapa	%	1	1	1	1	1	1	
			- Gambir	%	1	1	1	1	1	1	
			Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan :								
			- Padi	%	2	2	2	2	2	2	
			- Jagung	%	3	3,2	3,5	3,6	3,8	3,9	
			Persentase peningkatan produksi Hortikultura :								
			- Cabe	%	2	2	2	2	2	2	
			- Bawang merah	%	2	2	2	2	2	2	
- Manggis	%	2	2	2	2	2	2				
- Jeruk	%	1	1	1	1	1	1				
II	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	71	74	75	76	77	78	

Sumber : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka visi dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah: "Sumbar Pusat Pangan Asal Hewani Sumatera Bagian Tengah"

Visi tersebut mengandung kata kunci sbb:

Pusat Pangan Asal Hewan adalah

1. Sumatera Barat sebagai produsen ternak (Sapi Potong, kerbau, Kambing dan Unggas) di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu). Ternak unggas meliputi : Ayam Kampung, Itik, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur
2. Pangan Asal Hewan adalah produk yang dihasilkan oleh ternak berupa daging, telur dan susu.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi SKPD. Rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

"Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal".

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan, tujuan yang telah dirumuskan adalah:

"Meningkatkan produksi peternakan Sumatera Barat melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan".

Sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak;
2. Meningkatnya status kesehatan hewan; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.5 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan produksi peternakan Sumatera Barat	Persen Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1.22	1.33	1.44	1.55	1.66	1.75
		2.Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,6	0,4	0,3	0.2	0.1	0.1
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3.Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95

Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	1. Meningkatkan produksi pangan asal ternak	Ekstensifikasi (mengembangkan) dan intensifikasi (meningkatkan) kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
			2. Meningkatkan perbibitan sapi lokal berbasis kawasan dan kelompok peternak
			3. Memperluas dan mengembangkan produk peternakan meliputi penambahan komoditas prioritas
			4. Meningkatkan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
			5. Merekomendasi penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensinya
			6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan 8. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan 9. Meningkatkan pengendalian gangguan reproduksi pada ternak sapi 10. Peningkatan aplikasi bioteknologi reproduksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
	2.Meningkatnya status kesehatan hewan	a.Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Brucellosis b. Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	1. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota & Puskesmas) 2. Meningkatkan Surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan 1. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis 2. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikhnas). 3. Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet 4. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Sarana dan Bahan Medik 5. Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit – Unit Pelayanan Kesehatan Hewan & Kesmavet 6. Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis 7. Pemberdayaan jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner 8. Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			veteriner.
			9. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner
			10. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO).
			11. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti
			12. Pengembangan media informasi di bidang kesehatan hewan melalui pengembangan website dan jenis-jenis media informasi lainnya
			13. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular
	3.Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan organisasi melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi,tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitasi kinerja	1. Meningkatkan budaya kinerja aparatur
			2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
			3. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		b. Organisasi, peningkatan pengawasan,	1. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
			2. Peningkatan diklat bagi aparatur
			3. Pengembangan jabatan fungsional aparatur.
			4. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur
		b. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan
			2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peningkatan kualitas pelaporan
		c. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan organisasi	1. Peningkatan kualitas basis data perencanaan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016 – 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat

dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020 – 2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis nilai – nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluratistis, bersifat terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan bathin serta material dan spiritual.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian serta tersedianya prasarana publik terkait infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana

pendapatan masyarakat meningkat dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

TUJUAN

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Meningkatnya kinerja organisasi.

SASARAN

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan indikator:
 - a. Pendapatan Nelayan menjadi sebesar : Rp. 38.400.000 org/thn pada tahun 2021.
 - b. Pendapatan Pembudidaya ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/Thn pada tahun 2021.
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan(SDKP) yang berkelanjutan dengan indikator :
 - a. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 80% pada tahun 2021.
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan
 - a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar 153,76 milyar pada tahun 2021.
 - b. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/tahun pd tahun 2021.
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi :
 - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : A.
 - b. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sampai dengan tahun 2021 : sebesar > 95%.

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan Pendapatan pelaku usaha perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan	Rp/org/th	24.000.000	33.600.000	34.800.000	36.000.000	37.200.000	38.400.000
			- Jumlah pendapatan pembudidaya ikan	Rp/org/th	38.400.000	40.800.000	43.200.000	45.000.000	47.400.000	49.800.000
		2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	%	52	57	58	70	75	80
			3. Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	146,3	147,76	149,24	150,73	152,24
		- Konsumsi Ikan		Kg/kap/th	36,41	36,53	36,63	37	38	39
		2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	BB	BB	BB
- Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	%				≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

Dokumen Acuan : Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	a. Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th
		b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th		- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th
			Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
		c. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
				- Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8 Permasalahn Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Kawasan Budidaya	Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk yang setiap Tahun meningkat. 2. Perkembangan pembangunan makin meningkat yang mengakibatkan alih fungsi lahan 3. .Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Masih Belum Optimal. 2. Kebutuhan Atas Pangan Yang Semakin Meningkat. 3. Adanya Perda No 2. Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang beserta turunannya 4. Intensifikasi pertanian melalui penerapan teknologi baru

Hasil Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang sudah mengakomodir hasil analisa dan rekomendasi KLHS mulai dari penyusunan isu strategis sampai ke penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program. Beberapa rekomendasi berupa kegiatan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan perubahan renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ringkasan telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam skema berikut :

Tabel 3.9
Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
IV	Kemandirian Daerah	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	<p>Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian:</p> <p>Arah Kebijakan Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias Peningkatan produksi sub sektor peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Sumber Data: KLHS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. ASPEK TEKNIS

- a. Belum beragamnya pola konsumsi pangan
- b. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- c. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- d. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
- e. Rendahnya aspek kepemilikan lahan karena sebagian besar petani adalah petani penggarap.

2. ASPEK EKONOMIS

- a. Fluktuasi harga pangan;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian;
- c. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- d. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian; dan
- e. Rendahnya pendapatan petani.

3. ASPEK SOSIAL

- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan;
dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan;
2. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Petani;
4. Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan

Dengan Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019-2023

RENSTRA AWAL										RENSTRA PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		3,05%	3,17%	3,3%	3,43%	3,56%	1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun t-1 ke tahun t	3,65%	1,29%	2,56%	2,74%	3,41%
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 Kelompok pangan	85	85,25	85,5	85,75	86										
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	Jumlah produksi susu sapi/ tahun	396.000 liter/ tahun	414.000 liter/ tahun	432.000 liter/ tahun	450.000 liter/ tahun	468.000 liter/ tahun			Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	Jumlah produksi susu sapi/ tahun (liter/tahun)	-	-	293.687	-	-
			Pendapatan Pembudidaya Ikan	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	17.222.000 Rp/ Th/RTP	18.083.100 Rp/ Th/RTP	18.987.255 Rp/ Th/RTP	19.936.618 Rp/ Th/RTP	20.933.449 Rp/ Th/RTP				Produktivitas Susu Sapi	Rata-rata jumlah susu sapi (liter/ ekor/ hari)	-	-	-	11,2	11,8
			Produksi Padi	Jumlah produksi padi/ tahun	6.634 ton	6.750 ton	6.983 ton	7.216 ton	7.448 ton				Pendapatan Pembudidaya Ikan	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang) (Rp/ Th/RTP)	-	-	18.987.255	-	-
			Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias: - Tahap 1 (5%) = Perencanaan - Tahap 2 (25%) = Penyediaan sarana dan prasarana - Tahap 3 (50-75%) = Lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugas dan Petani - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias	5%	25%	50%	75%	100%				Angka Konsumsi Ikan	Jumlah Ketersediaan ikan dibagi jumlah penduduk (kg/orang/tahun)	-	-	-	35	36
													Produksi Padi	Jumlah produksi padi/ tahun (ton/ha)	-	-	6.983	-	-
													Produktivitas Padi	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	-	-	-	6,3	6,4
													Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias (%)	-	-	50	100	100
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan		Angka Kemiskinan	Dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk keseluruhan di wilayah tertentu	5,45	5,03	4,60	4,18	3,75	2.	Menurunnya Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk keseluruhan di wilayah tertentu	5,60%	5,24%	5,92%	5,79%	5,65%

RENSTRA AWAL										RENSTRA PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Gini	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i (Q_i + Q_i - 1)}{2}$ dimana: p_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke i Q_i = persentase kumulatif total pertanahan atau pertanahan sampai kelas ke- i Nilai G berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24				Indeks Gini	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i (Q_i + Q_i - 1)}{2}$ dimana: p_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i Nilai G berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	0,322	0,394	0,309	0,308	0,307
		Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali 100 persen	2%	8%	10%	11%	12%			Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	Pendapatan petani sebelum menerima bantuan dibagi pendapatan sesudah menerima bantuan dikali 100% (%)	-	-	10	11	12
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39	3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	11,01	10,73	10,87	10,92	11,11
		Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	kenaikan 10 persen dari pendapatan petani/tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurangi biaya produksi	10%	20%	30%	40%	50%			Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	Persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurangi biaya produksi (%)	-	-	30%	40%	50%
										4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalensi stunting	Persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	19,5	17,03	16,52	15,51	13,98
											Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 Kelompok pangan	-	-	85,5	85,75	86	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Tujuan Pertama yang ditetapkan adalah meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan. Sasaran dari tujuan pertama adalah meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Adapun yang menjadi indikator sasarannya adalah produksi susu sapi dengan target 396.000 liter/tahun pada tahun 2019, 414.000 liter/tahun pada tahun 2020, 293.687 liter/tahun pada tahun 2021, kemudian untuk tahun 2022 sampai dengan 2023, indikator sasaran dari tujuan pertama ini mengalami perubahan menjadi produktivitas susu sapi dengan target 11,2 liter/ekor/hari pada tahun 2022 dan 11,8 liter/ekor/hari pada tahun 2023. Rata-rata produksi susu sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari. Upaya untuk peningkatan produksi susu sapi ini sangat didukung oleh ketersediaan bibit unggul, penyediaan pakan, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknik pengolahan dan pemasaran susu.

Begitu juga dengan indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2019, 18.083.100 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2020, 18.987.255 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, indikator sasaran pendapatan pembudidaya ikan ini mengalami perubahan menjadi Angka Konsumsi Ikan dengan target pada tahun 2022 adalah 35 kg/orang/tahun dan tahun 2023 36 kg/orang/tahun. Sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk. Pengembangan usaha perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih dan induk ikan unggul. Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Untuk menunjang pencapaian target kinerja diatas sangat didukung dengan tersedianya luas lahan budidaya perikanan sebesar 5,14 ha, sarana dan prasarana budidaya perikanan, ketersediaan bibit unggul di UPTD BBI dan dukungan petani ikan.

Kemudian indikator kinerja produksi padi yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 6.634 ton pada tahun 2019, 6.750 ton pada tahun 2020, 6.983 ton pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, indikator produksi padi ini mengalami perubahan menjadi produktivitas padi dengan target 6,3 ton/ha pada tahun 2022 dan 6,4 ton/ha pada tahun 2023. Upaya peningkatan produktivitas padi tersebut di atas dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia yang dilakukan dengan lebih efisien pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.

Indikator kinerja persentase terbentuknya klaster tanaman hias yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 5 % pada tahun 2019, 25% pada tahun 2020, 50% pada tahun 2021, 100% pada tahun 2022 dan 100% pada tahun 2023. Tanaman Hias merupakan komoditi unggulan di Kota Padang Panjang yang sangat potensi untuk dikembangkan dilihat dari segi agropedoklimat yang mendukung dan letak Kota Padang Panjang yang strategis. Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman Hias melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 521.305.2013 tanggal 26 Maret 2013. Terbentuknya Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH) Kota Padang Panjang tanggal 5 Juni 2018 sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Tanaman Hias di Kota Padang Panjang. Pembentukan klaster bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman hias, peluang pasar dengan mengembangkan konsep agrowisata untuk kesejahteraan petani tanaman hias di Kota Padang Panjang.

Tujuan kedua yang ditetapkan adalah Menurunnya Angka Kemiskinan. Sasaran dari tujuan kedua adalah meningkatnya pendapatan petani penerima bansos, dengan indicator sasaran adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos. Sepanjang tahun 2019-2023 pendapatan petani akan meningkat secara berturut-turut dari 2% pada tahun 2019, 8% pada tahun 2020, 10 % pada tahun 2021, 11 % pada tahun 2022 dan 12 % pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan meningkatnya bantuan sosial setiap tahunnya baik berasal dari dana APBD, APBD Provinsi dan Dana APBN.

Tujuan ketiga yang ditetapkan adalah Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya pendapatan petani dan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani. Sepanjang tahun 2019-2023 pendapatan petani akan meningkat secara berturut-turut sekitar

10% pada setiap tahunnya. Pendapatan petani diutamakan komoditinya adalah padi karena luas lahan sawah adalah 630 Ha dengan pendapatan awal sebesar Rp.2.000.000/bulan/ha. Untuk menunjang peningkatan pendapatan petani adalah dengan menerapkan teknologi di bidang pertanian dan peningkatan Sumber Daya Manusia Petani. Pada sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan) terdaftar petani yang bergerak di bidang pertanian sebanyak 2.344 orang di Kota Padang Panjang.

Tujuan keempat yang ditetapkan adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasarannya adalah adalah menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan. Adapun yang menjadi indikator sasarannya adalah Skor Pola Pangan Harapan. Pada Tahun Pertama Renstra (tahun 2019), nilai skor pola pangan harapan 85, untuk 5 (lima) tahun kedepan ditargetkan jumlah skor pola pangan harapan akan bertambah sebanyak 85,25 pada tahun 2020, 85,5 skor pada tahun 2021, 85,75 skor tahun 2022 dan 86 skor tahun 2023. Saat ini konsumsi pangan padi-padian, minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang terlihat dari skor AKE yang melebihi skor maksimum. Sementara konsumsi terhadap pangan umbi-umbian, pangan hewani dan gula masih dibawah yang dianjurkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Bedasarkan pengertian dari strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan potensi yang ada sebagaimana pada tabel berikut ini:

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

RENSTRA AWAL				RENSTRA PERUBAHAN								
VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat				VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat								
MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan				MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
Tujuan 1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1.Sasaran 1.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan	1.Strategi 1.2 Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	1.Arah Kebijakan 1.1 Fasilitasi Pemanfaatan lahan pekarangan	Tujuan 1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan								
			2.Arah Kebijakan 1.2 Fasilitasi Pengolahan Pangan lokal dan pemanfaatan teknologi									
	2.Sasaran 2.1 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	2.Strategi 2.1 Peningkatan Produksi Peternakan dan Produk Olahannya	1.Arah Kebijakan 2.1 Pembinaan peningkatan produksi dan kualitas produk peternakan					1.Sasaran 1.1 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1.Strategi 1.1 Peningkatan produksi sub sektor peternakan	1.Arah Kebijakan 1.1 Pembinaan peningkatan produksi dan kualitas produk peternakan		
			2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen							2.Arah Kebijakan 1.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen		
			3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani							3.Arah Kebijakan 1.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani		
			2.Strategi 2.2 Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan							1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi penyediaan benih unggul	2.Strategi 1.2 Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias	1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi penyediaan benih unggul
										2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen perikanan		2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen perikanan
										3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Perikanan		3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Perikanan
										4. Arah Kebijakan 2.4 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran		4. Arah Kebijakan 2.4 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran
			2.Strategi 2.3 Peningkatan Produksi Padi							1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi budidaya pertanian	3.Strategi 1.3 Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias	1.Arah Kebijakan 3.1 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi budidaya pertanian
2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi penyediaan benih unggul				2.Arah Kebijakan 3.2 Fasilitasi penyediaan benih unggul								

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani dan Petugas				3.Arah Kebijakan 3.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani dan Petugas
		2.Strategi 2.4 Peningkatan Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tanaman hias			4.Strategi 1.4 Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias	1.Arah Kebijakan 4.1 Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tanaman hias
			2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan (Asosisasi Petani Tanaman Hias)				2.Arah Kebijakan 4.2 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan (Asosisasi Petani Tanaman Hias)
Tujuan 2 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	1.Sasaran 2.1 Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bantuan Sosial	1.Strategi 2.2 Memberikan Bantuan Ternak Sesuai Permintaan Calon Penerima Bansos	1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi Peningkatan pendapatan petani penerima Bantuan sosial	Tujuan 2 Menurunnya Angka Kemiskinan	1.Sasaran 2.1 Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bantuan Sosial	1.Strategi 1.1 Optimalisasi Pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan teknis dan modal bagi masyarakat miskin	1.Arah Kebijakan 1.1 Memberikan Bantuan Ternak Sesuai Potensi Calon Penerima Bansos dan melakukan monitoring/evaluasi
		2.Strategi 2.2 Pembinaan dan Evaluasi perkembangan penerima bantuan sosial					
Tujuan 3 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3.Sasaran 1.1 Meningkatnya Pendapatan Petani	1.Strategi 1.1 Pemakaian Teknologi di Bidang pertanian	1.Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan Kemampuan SDM Petani dalam Penggunaan Teknologi Pertanian	Tujuan 3 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3.Sasaran 3.1 Meningkatnya Pendapatan Petani	1.Strategi 1.1 Pengembangan rumah wirausaha	1.Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan Kemampuan SDM Petani dalam Penggunaan Teknologi Pertanian
				Tujuan 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 4.1. Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan	1. Strategi 1.1. Intervensi gizi sensitive pada kelompok keluarga dan masyarakat umum	1. Arah kebijakan 1.1. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan
							2.Arah Kebijakan 1.2 Optimalisasi pengawasan keamanan pangan
							3.Arah Kebijakan 1.3 Fasilitasi Penanganan kerawanan pangan

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program perubahan renstra tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini dilakukan pemutakhiran pada tahun 2020 yaitu dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1 RENSTRA OPD KOTA PADANG PANJANGDINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan-1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,82	3,65		1,29		2,56		2,74		3,41		3,41	
Sasaran-1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	0	0		0		293687		0		0		293687	
		Produktivitas Susu Sapi	0	0		0		0		11,2		11,8		11,8	
		Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	0	5		25		50		100		100		100	
		Produksi Padi	0	0		0		6983		0		0		6983	
		Produktivitas Padi	0	0		0		0		6,3		6,4		6,4	
		Pendapatan Pembudidaya Ikan	0	0		0		18987255		0		0		18987255	
		Angka Konsumsi Ikan	0	0		0		0		35		36		36	
3-25-04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	0	0		0		3	89.000.000	5	842.980.300	7	478.234.400	7	1.410.214.700
3-25-04-2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan	720	0		0		700	89.000.000	735	842.980.300	750	478.234.400	750	1.410.214.700
3-25-04-2.04-02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang disediakan	0	0		0		6		6		6		6	
		Jumlah Tenaga Penunjang Operasional BBI	0	0		0		0		7		7		7	
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan UPTD BBI)	0	0		0		3		3	842.980.300	1	478.234.400	1	2.164.195.000
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0		6		6		6		18	
3-25-04-2.04-03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan DAK	0	0		0		1		0		0		1	
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian)	0	0		0		0	89.000.000	0		0		0	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-25-06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan	0	0		0		18987225	20.073.450	19936618	80.000.000	20933449	50.000.000	20933449	150.073.450
3-25-06-2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	0	0		0		1	20.073.450	3	80.000.000	3	50.000.000	7	150.073.450
3-25-06-2.01-01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	0	0		0		1	20.073.450	3	80.000.000	3	50.000.000	7	210.000.000
		Jumlah Data Profile Perikanan Kota Padang Panjang	0	0		0		1		1		1		3	
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	0	0		0		1		1		1		3	
3-27-02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	-	-		-		65	765.600.950	70	1.541.995.500	75	1.048.662.200	75	3.356.258.650
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	-	-		-		60		65		70			
3-27-02-2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	0	0		0		2	22.000.000	2	41.600.000	2	125.885.000	2	189.485.000
3-27-02-2.01-02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	0	0		0		12	22.000.000	12	41.600.000	12	125.885.000	36	209.085.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Operator Alsintan (Pemuda)	0	0		0		0		30		30		60	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0	0		0		1		1		1		3	
3-27-02-2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		5	293.067.950	0	597.000.000	0	262.777.200	5	1.152.845.150
		Produksi Tanaman Hias	71548	0		0		79105		83060		87213			
		Produksi Padi	7822,7	0		0		6983		7216		7448			
		Luas Lahan Pertanian Organik	9,7	0		0		1		1		1			

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-02-2.02-02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Beroperasi	0	0		0		1	75.571.200	1	285.000.000	1	262.777.200	1	832.777.200
		Luas Lahan Pembibitan Tanaman Hias yang Dilaksanakan	0	0		0		0		1		1			
		Jumlah Pengembangan Pertanian Organik yang Dilaksanakan	0	0		0		0		0		1		1	
		Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Hasil yang Dilaksanakan	0	0		0		0		0		13		13	
		Jumlah Peserta Pelatihan Tanaman Hias yang Dilaksanakan	0	0		0		0		0		30		30	
		Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman yang Dilaksanakan	0	0		0		0		20		20		40	
		Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan	0	0		0		0		2		2		2	
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Petugas Administrasi Bidang TPHP)	0	0		0		0		1		1		1	
		Jumlah Peserta Studi Kompratif ke Daerah Potensi Pertanian	0	0		0		0		10		10		20	
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	0		0		1		1		1		3	
3-27-02-2.02-03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		5	217.496.750	0	312.000.000	0		5	624.000.000
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0		0		1		0		0		0	
3-27-02-2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	0	0		0		19	450.533.000	11	591.395.500	5	600.000.000	5	1.641.928.500
		Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal	0	0		0		1		1		1		1	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-02-2.03-01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	0	0		0		19	450.533.000	11	591.395.500	5	600.000.000	5	1.782.791.000
		Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	0	0		0		0		4		4			
		Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	0	0		0		0		1		1			
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0	0		0		1		1		1			
		Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar	0	0		0		1		1		1			
3-27-02-2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		0		2	312.000.000	1	60.000.000	3	372.000.000
3-27-02-2.06-01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		0		2	312.000.000	1	60.000.000	3	684.000.000
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0		0		0	4	2		6			
3-27-03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	-	-		-		65	150.700.000	70	604.041.800	75	238.000.000	75	992.741.800
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	-	-		-		60		65		70		70	
3-27-03-2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	0	0		0		0		147,05	18.000.000	147,05	15.000.000	147,05	33.000.000
3-27-03-2.01-01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	0	0		0		0		350	18.000.000	350	15.000.000	700	51.000.000
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0	0		0		0	1	1		1			

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-03-2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0		0		0	136.700.000	2	572.046.800	2	210.000.000	4	918.746.800
		Jumlah Jenis Prasarana yang Dibangun	0	0		0		0		1		1		1	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	0	0		0		3		1		3		3	
		Tugu Ikon Kota Padang Panjang	0	0		0		0		0		2		2	
3-27-03-2.02-01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	0	0		0		0		1		1		2	
		Jumlah Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	0	0		0		0		1		1		2	
		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0	0		0		0		1	10.000.000	1	59.603.200	2	79.603.200
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kegiatan	0	0		0		0		0		150		150	
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	0	0		0		0		1		1		2	
3-27-03-2.02-03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Ruas Jalan Usaha Tani yang Dibangun	0	0		0		0		1		1		2	
		Jumlah Ruas Jalan Produksi yang Dibangun	0	0		0		0		0	435.000.000	1		1	870.000.000
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0		0		0		1		1		1	
3-27-03-2.02-09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	0	0		0		3		1		3		3	
		Jumlah Tugu Ikon Kota Padang Panjang (Tugu Sapi Perah)	0	0		0		0		0		2		2	
		Jumlah Ruang Rawat Inap di Puskesmas	0	0		0		0		0		1		1	
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH)	0	0		0		0	136.700.000	3	127.046.800	3	150.396.800	3	404.490.400
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0		0		3		3		3		3	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-03-2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	0	0		0		50	14.000.000	50	13.995.000	75	13.000.000	175	40.995.000
		Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit	0	0	0	19	11	5		5					
3-27-03-2.03-01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit	0	0		0		19	14.000.000	11	13.995.000	5	13.000.000	5	40.990.000
		Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	0	0	0	50	50	75							
		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0	0	0	1	1	1		3					
3-27-04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/Hewan/Kasus	0	0		0		7	368.388.550	7,5	693.133.038	8	549.616.150	8	1.611.137.738
3-27-04-2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	0	0		0		100	230.789.150	100	246.998.650	100	218.552.350	100	696.340.150
3-27-04-2.01-01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kasus Zoonosis yang mengalami Penurunan	0	0		0		1	112.236.800	1	116.916.800	1	100.000.000	1	333.833.600
		Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi	0	0	0	35	35	105							
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	0	0	0	995	995	2990							
		Jumlah Tenaga Teknis: Paramedis, Yankeswan dan PSDR	0	0	0	3	2	3							
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0	0	0	1	1	3							
3-27-04-2.01-02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	0	0		0		25	118.552.350	45	130.081.850	55	118.552.350	125	378.716.050
		Jumlah Jenis Pengadaan Obat-Obat Hewan dan Vaksin Rabies	0	0	0	60	60	185							
		Jumlah Hewan yang Divaksinasi Rabies	0	0	0	1200	1200	3700							
		Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	1	1	1							

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3-27-04-2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	0	0		0		0		100	103.682.400	100	100.000.000	100	203.682.400			
3-27-04-2.03-02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Jenis Sarana Pendukung Diagnosa Penyakit Hewan	0	0		0		0		0		3		3	307.364.800			
		Jumlah Sarana Pelayanan Keliling (Mobil Roda Empat/Ambulan hewan)	0	0		0		0		0		1		1				
		Jumlah Tenaga Teknis Medis Veteriner (Dokter Hewan)	0	0		0		0		1		1		1				
		Jumlah Tenaga Teknis Paramedis Veteriner (D3 Kesehatan Hewan)	0	0		0		0		0	103.682.400	1	100.000.000	1				
		Jumlah Dana Pendamping Kementerian Pertanian	0	0		0		0		1		1		1				
		Jumlah Sarana Penunjang Ruang Rontgen/ X-Ray	0	0		0		0		0		1		1				
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	0		0		0		1		1		1				
3-27-04-2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti	0	0		0		0	137.599.400	1	342.451.988	1	231.063.800	2	711.115.188			
		Jumlah Sertifikasi Produk Susu	0	0		0		1		1		1		1				
3-27-04-2.04-01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti	0	0		0		0	22.000.000	1	138.125.188	1	104.937.000	2	381.187.376			
		Jumlah Sertifikat Produk Susu	0	0		0		1				1				1		
		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0	0		0		1				1				1		3
3-27-04-2.04-02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemeriksaan Hewan Qurban	0	0		0		600	115.599.400	600	204.326.800	600	126.126.800	1800	534.780.400			
		Jumlah Uji Sampel	0	0		0		200				200				230		
		Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator, Hoist, Petugas Penjual Hewan, Petugas Bongkar Muat Daging)	0	0		0		0				3				3		3
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0	0		0		1				1				1		3
3-27-05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	0	0		0		40	15.084.000	60	16.620.000	70	47.620.000	70	79.324.000			

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-05-2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	0	0		0		0	15.084.000	0	16.620.000	20	47.620.000	20	79.324.000
		Jumlah Sarana Proteksi Tanaman yang Disediakan	0	0		0		2		0		2			
		Luas sawah yang diasuransikan	0	0		0		294,01		295		150		739,01	
3-27-05-2.01-01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	0	0		0		0	15.084.000	0	16.620.000	20	47.620.000	20	79.324.000
		Jumlah Sarana Proteksi Tanaman	0	0		0		2		0		2			
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0	0		0		12		10		8		8	
3-27-05-2.01-05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Sosialisasi AUTP	0	0		0		0	15.084.000	150	16.620.000	150	47.620.000	300	80.860.000
		Jumlah Premi AUTP	0	0		0		0		295		295			
		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0		0		0		12		12		24	
Tujuan-2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	19,70	19,50		17,03		16,52		15,51		13,98		13,98	
Sasaran-2	Menurunnya prevalensi stunting dari Sektor Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	0	0		0		85,5		85,75		86		86	
2-09-03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	-	-		-		100	80.224.160	100	306.507.108	100	164.292.500	100	551.023.768
		Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	-	-		-		100		100		100			
2-09-03-2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2812,12	0		0		2400	39.442.560	2400	137.312.500	2400	67.244.900	2400	243.999.960

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-09-03-2.01-01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	0	0		0		2		0		0		2	
		Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)	0	0		0		0		10		10		20	
		Jumlah Buku Analisis Harga Pangan	0	0		0		10	39.442.560	10	33.442.500	0	33.442.500	20	100.327.500
		Jumlah Tenaga Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/ Kegiatan (Bidang Ketahanan Pangan)	0	0		0		1		1		1		1	
		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0	0		0		2		2		2		6	
2-09-03-2.01-02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0	0		0		0		1		0		1	
		Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan yang dilaksanakan	0	0		0		0		2	93.375.000	0		2	186.750.000
		Jumlah Lomba Pemanfaatan Pekarangan	0	0		0		0		1		0		1	
2-09-03-2.01-04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Kota Padang Panjang	0	0		0		0		350		350		700	
		Jumlah Buku Analisis Harga Pangan	0	0		0		0		10	10.495.000	10	5.082.500	20	26.072.500
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0	0		0		0		1		1		2	
2-09-03-2.01-06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Outlet Toko Tani Indonesia	0	0		0		0		0		1		1	
		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0	0		0		0		0		1	28.719.900	1	28.719.900
2-09-03-2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	0	0		0		0		3	33.000.000	0		3	33.000.000
2-09-03-2.02-03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0		0		0		3	33.000.000	0		0	66.000.000
2-09-03-2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2161,9	0		0		1824,60	40.781.600	1840	136.194.608	1845	97.047.600	1845	274.023.808
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	62,64	0		0		55		56		57		57	
2-09-03-2.04-01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Buku Pola Pangan Harapan yang disusun	0	0		0		20	5.200.000	10	17.650.000	10	5.000.000	40	40.300.000
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0	0		0		1		1		1		3	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-09-03-2.04-02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan yang Dilakukan	0	0		0		1	35.581.600	2	118.544.608	2	92.047.600	5	329.136.816
		Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Provinsi	0	0		0		0		1		1		2	
		Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Nasional	0	0		0		0		1		1		2	
		Jumlah Petugas Pengelola Toga	0	0		0		0		1		1		1	
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0	0		0		1		1		1		3	
2-09-04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kasus Rawan Pangan	-	-		-		-		-		100	85.000.000	100	85.000.000
2-09-04-2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Rawan Pangan	0	0		0		0		0		50	85.000.000	50	85.000.000
2-09-04-2.02-01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Rawan Pangan yang dibantu	0	0		0		0		0		50	85.000.000	50	85.000.000
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0	0		0		0		0		1		1	
2-09-05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	-	-		-		100	10.554.680	100	40.940.960	100	26.317.520	100	77.813.160
2-09-05-2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan	0	0		0		3	10.554.680	3	40.940.960	3	26.317.520	9	77.813.160
2-09-05-2.01-04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan yang Dilaksanakan	0	0		0		1	4.865.000	2	30.645.000	2	16.111.000	5	77.401.000
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0		1		1		1		3	
2-09-05-2.01-05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan	0	0		0		3	5.689.680	3	10.295.960	3	10.206.520	9	30.798.440
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0		1		1		1		3	
Tujuan-3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Indeks GIni	0,30	0,322		0,394		0,309		0,308		0,307		0,307	
		Tingkat Kemiskinan	6,17	5,60		5,24		5,32		5,79		5,65		5,08	
Sasaran-3	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	0	0		0		10		11		12		12	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	-	-		-		65	765.600.950	70	1.541.995.500	75	1.048.662.200	75	3.356.258.650
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	-	-		-		60		65		70			
3-27-02-2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	0	0		0		2	22.000.000	2	41.600.000	2	125.885.000	2	189.485.000
3-27-02-2.01-02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	0	0		0		12	22.000.000	12	41.600.000	12	125.885.000	36	209.085.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Operator Alsintan (Pemuda)	0	0		0		0		30		30			
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0	0		0		1		1		1			
3-27-02-2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		5	293.067.950	0	597.000.000	0	262.777.200	5	1.152.845.150
		Produksi Tanaman Hias	71548	0		0		79105		83060		87213			
		Produksi Padi	7822,7	0		0		6983		7216		7448			
		Luas Lahan Pertanian Organik	9,7	0		0		1		1		1			

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3-27-02-2.02-02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Beroperasi	0	0		0		1	75.571.200	1	285.000.000	1	262.777.200	1	832.777.200
		Luas Lahan Pembibitan Tanaman Hias yang Dilaksanakan	0	0		0		0		1		1		1	
		Jumlah Pengembangan Pertanian Organik yang Dilaksanakan	0	0		0		0		0		1		1	
		Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Hasil yang Dilaksanakan	0	0		0		0		0		13		13	
		Jumlah Peserta Pelatihan Tanaman Hias yang Dilaksanakan	0	0		0		0		0		30		30	
		Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman yang Dilaksanakan	0	0		0		0		20		20		40	
		Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan	0	0		0		0		2		2		2	
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Petugas Administrasi Bidang TPHP)	0	0		0		0		1		1		1	
		Jumlah Peserta Studi Kompratif ke Daerah Potensi Pertanian	0	0		0		0		10		10		20	
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	0		0		1		1		1		3	
3-27-02-2.02-03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		5	217.496.750	0	312.000.000	0		5	624.000.000
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0		0		1		0		0		0	
3-27-02-2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	0	0		0		19	450.533.000	11	591.395.500	5	600.000.000	5	1.641.928.500
		Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal	0	0		0		1		1		1		1	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3-27-02-2.03-01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	0	0		0		19	450.533.000	11	591.395.500	5	600.000.000	5	1.782.791.000	
		Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	0	0		0		0		4		4		4		
		Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	0	0		0		0		1		1		1		
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0	0		0		1		1		1		1		3
		Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar	0	0		0		1		1		1		1		1
3-27-02-2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		0		2	312.000.000	1	60.000.000	3	372.000.000	
3-27-02-2.06-01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	0	0		0		0		2	312.000.000	1	60.000.000	3	684.000.000	
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0		0		0	4	2		6				
Tujuan-4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10,24	11,01		10,73		10,87		10,92		11,11		11,11		
Sasaran-4	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	0	0		0		30		40		50		50		
3-27-07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	-	-		-		59,00	12.115.000	67,80	383.230.000	100	205.312.500	100	600.657.500	
3-27-07-2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	0	0		0		20	12.115.000	20	383.230.000	19	205.312.500	59	600.657.500	
3-27-07-2.01-02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penilaian Kelompok Tani Berprestasi	0	0		0		0		0	333.230.000	3	135.312.500	3	801.772.500	
		Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani	0	0		0		500	250	250		1000				
		Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional	0	0		0		0	1	1		2				
		Jumlah Field Day Kelembagaan Tani	0	0		0		0	1	1		2				
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0		0		20	20	20		60				
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian)	0	0		0		0	0	0		1		1		

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3-27-07-2.01-03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis Teknologi yang akan diterapkan	0	0		0		1		2		2		2		
		Jumlah Fielday Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna	0	0		0		0		1		1		1		
		Jumlah Training Penyuluh Pertanian	0	0		0		0	12.115.000	0	50.000.000		6	70.000.000	6	170.000.000
		Jumlah Temu Teknis Penyuluhan	0	0		0		0		0		1		1		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0	0		0		2		2		2		2		
X-XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	0	0		0		90	9.139.302.859	90	8.348.054.420	90	8.358.450.616	90	25.845.807.895	
X-XX-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan yang Tersedia	0	0		0		14	569.900	0		0		14	569.900	
X-XX-01-2.01-06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0		0		14	569.900	0		0		14		
X-XX-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	0	0		0		90	7.343.119.100	90	6.759.155.116	90	6.874.399.716	90	20.976.673.932	
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0		0		58	7.341.103.500	58	6.757.510.666	58	6.872.699.716	58	20.387.721.048	
X-XX-01-2.02-05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0		0		1	1.064.800	1	495.000	1	500.000	1	1.490.000	
X-XX-01-2.02-07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0		0		14	579.000	14	999.950	14	1.000.000	14	2.999.900	
X-XX-01-2.02-08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0		0		1	371.800	1	149.500	1	200.000	3	499.000	
X-XX-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	0	0		0		90	306.836.475	90	315.367.900	90	272.650.100	90	894.854.475	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0		0		21	17.342.100	21	23.492.850	21	16.000.000	21	62.985.700
X-XX-01-2.06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Pendukung Penyediaan Surat Menyurat	0	0		0		3	126.884.275	0	130.650.100	0	130.650.100	3	391.950.300
		Jumlah Alat Kebersihan	0	0		0		47		0		0		47	
		Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan	0	0		0		74		0		0		74	
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	0	0		0		0		7		7		7	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0		0		7		7		7		7	
X-XX-01-2.06-05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0		0		3	38.626.750	3	37.226.750	3	16.000.000	3	90.453.500
X-XX-01-2.06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	0	0		0		229	123.983.350	196	123.998.200	150	110.000.000	575	357.996.400
		Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Disediakan	0	0		0		705		466		900		2071	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0		0		229		196		150		575	
X-XX-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0		0		100		100	60.000.000	100	40.000.000	100	100.000.000
X-XX-01-2.07-06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0		4	60.000.000	15	40.000.000	19	160.000.000
X-XX-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	0	0		0		90	896.474.834	90	709.215.354	90	715.900.800	90	2.321.590.988
X-XX-01-2.08-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	0	0		0		0		3	4.000.000	3	4.000.000	3	12.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0		0		0		3		3		3	
X-XX-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	0	0		0		3	203.834.034	3	251.765.754	3	205.000.000	3	708.531.508
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0		0		3		3		3		3	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X-XX-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	0	0		0		25	692.640.800	17	453.449.600	17	506.900.800	17	1.413.800.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0		0		25		17		17			
X-XX-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	0		0		90	592.302.550	90	504.316.050	90	455.500.000	90	1.552.118.600
X-XX-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0		0		61	330.492.950	61	330.500.800	61	330.500.000	61	991.501.600
X-XX-01-2.09-06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	0	0		0		7	66.809.600	7	66.815.250	7	50.000.000	7	183.630.500
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0		0		7		7		7			
X-XX-01-2.09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		0		3	195.000.000	7	100.000.000	7	75.000.000	7	275.000.000
X-XX-01-2.09-12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah yang Tersedia	0	0		0		0		2	7.000.000	0		2	14.000.000
		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0	0		0		0		2		0		2	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran)

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 7.1.

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERUBAHAN RPJMD YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	KINERJA
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Skor Pola Pangan Harapan	index	-% AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 - Skor AKE = % AKE x Bobot - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan	80,20	85,60	85,50	85,75	86,00	86,00
1	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	%	Banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan energi	94,50	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	%	Banyaknya protein yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan protein	101,90	102,11	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Penanganan Kasus Rawan Pangan	%	Jumlah Kasus Rawan Pangan yang Ditangani dibagi jumlah kasus yang terjadi dikali 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Persentase Pengawasan Pangan Segar	%	Jumlah jenis sampel pangan segar yang diuji dibagi jumlah jenis sampel pangan segar yang termasuk kewenangan pemerintah daerah (3 jenis) dikali seratus persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/ thn/ RTP	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	20.187.640	18.580.002	18.987.255	0,00	0,00	0,00
III	Angka Konsumsi Ikan	kg/ orang/ tahun	Jumlah ketersediaan ikan dibagi jumlah penduduk	0,00	0,00	0,00	35,00	36,00	36,00
1	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	%	Jumlah produksi tahun lalu dikali persentase target produksi tahun berjalan	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	7,00
2	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan	rupiah/ tahun/ RTP	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	0,00	0,00	18.987.255,00	19.936.618,00	20.933.449,00	20.933.449,00
IV	Produksi Susu Sapi	liter/ tahun	Jumlah produksi susu sapi	396.720	326.206	293.687	0,00	0,00	293.687
V	Produktivitas Susu Sapi	liter/ ekor/ tahun	Rata-rata jumlah susu sapi	0,00	0,00	0,00	11,20	11,80	11,80
VI	Produksi Padi	ton	Jumlah produksi padi/ tahun	9.810,60	8.557	6.983	0,00	0,00	6.983
VII	Produktivitas Padi	ton/ ha	Jumlah produksi padi/ ha	0,00	0,00	-	6,30	6,40	6,40
VIII	Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	%	Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias (%)	5,00	5,00	50,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	KINERJA
1	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	%	Jumlah sarana pertanian/ peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	0,00	0,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	%		0,00	0,00	60,00	65,00	70,00	100,00
3	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	Jumlah prasarana pertanian/ peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	0,00	0,00	65,00	70,00	75,00	100,00
4	Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	%		0,00	0,00	60,00	65,00	70,00	100,00
5	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	Jumlah bencana pertanian yang ditangani dibagi dengan jumlah bencana pertanian yang terjadi dikali seratus persen	0,00	0,00	40,00	60,00	70,00	70,00
6	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	%	Jumlah Kasus penyakit hewan/ ternak yang zoonosis dalam tahun berjalan dibagi jumlah kasus penyakit ternak/ hewan zoonosis tahun lalu kali seratus persen	5,10	7,00	7,00	7,50	8,00	8,00
IX	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	%	Pendapatan petani sebelum menerima bantuan dibagi pendapatan sesudah menerima bantuan dikali 100%	0,00	0,00	10,00	11,00	12,00	12,00
1	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	%	Jumlah sarana peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	0,00	10,00	60,00	65,00	70,00	70,00
X	Meningkatnya Pendapatan Petani	%	Persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi	10,00	24,00	30,00	40,00	50,00	50,00
1	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	%	Penerapan Inovasi dibidang teknologi budidaya Masyarakat (Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi dibagi total jumlah kelompok tani)	0,00	0,00	59,00	67,80	100,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 7 macam, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah:
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran indikator produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/ tahun. Cara pengukuran produktivitas susu sapi adalah jumlah total produksi susu sapi dalam setahun dibagi dengan jumlah populasi sapi perah betina produktif
3. Cara pengukuran indikator produktivitas susu sapi adalah Rata-rata jumlah susu sapi dalam satu tahun.
4. Cara pengukuran indikator pendapatan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi ikan kali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan).
5. Cara pengukuran indikator Angka Konsumsi Ikan adalah jumlah ketersediaan ikan dibagi jumlah penduduk dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran indikator produksi padi adalah jumlah produksi padi/ tahun.
7. Cara pengukuran produktifitas padi adalah produksi padi dalam setahun (ton) dibagi luas tanam padi (Ha).
8. Cara Pengukuran Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias adalah progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias:
 - a) Tahap 1 (5%) = perencanaan;
 - b) Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugas dan Petani; dan
 - d) Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias.

9. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos adalah Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
10. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani adalah persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi

BAB VIII PENUTUP

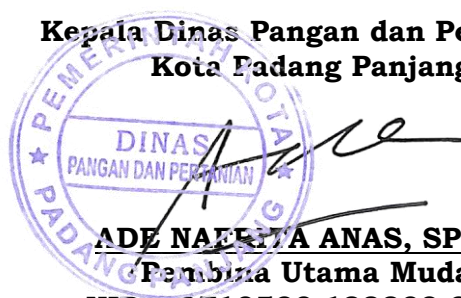
Perubahan Rencana Strategis disusun sebagai arah pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan Rancangan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Dengan telah disusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Perubahan Renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menunjang pencapaian visi misi Kota Padang Panjang sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Padang Panjang, Desember 2021

**Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang**



ADE NAELITA ANAS, SP, MP
Pembina Utama Muda,
NIP. 19710520 199903 2 004